

TUGAS ANALISIS KEBIJAKAN

Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat untuk Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan



ANDRE YUSFIAN

2526061004

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

2026

Abstrak

Permasalahan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya aktivitas dan pola konsumsi masyarakat. Pengelolaan sampah yang masih berfokus pada proses pengangkutan dan pembuangan akhir belum mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Akibatnya, berbagai dampak negatif muncul seperti pencemaran lingkungan, banjir akibat saluran tersumbat, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, serta kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

Policy paper ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengelolaan sampah serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan berupa analisis deskriptif terhadap berbagai permasalahan dan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan program bank sampah, edukasi lingkungan, pemilahan sampah rumah tangga, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menjadi solusi yang lebih efektif.

Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi jumlah sampah, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta menciptakan manfaat sosial dan ekonomi. Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, kebijakan publik, lingkungan bersih, pembangunan berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu persoalan publik yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat modern. Pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan urbanisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan jumlah produksi sampah meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Aktivitas rumah tangga,

industri, perdagangan, maupun sektor jasa menghasilkan limbah dan sampah dalam jumlah besar setiap harinya. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah, khususnya dalam menyediakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang memerlukan pengelolaan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan (UU No.18 Tahun 2008).

Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari aspek lingkungan, penumpukan sampah dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Sampah yang menumpuk di saluran air juga sering menjadi penyebab banjir di wilayah perkotaan. Selain itu, pembakaran sampah secara sembarangan dapat menghasilkan polusi udara yang berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan. Dari aspek kesehatan, sampah yang tidak terkelola dapat menjadi sarang berkembangnya berbagai vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk yang berpotensi menimbulkan penyakit menular. Sementara dari sisi sosial dan ekonomi, kondisi lingkungan yang kotor dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat serta menambah beban biaya pemerintah dalam penanganan dampaknya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah sebagai bentuk upaya penanganan persoalan tersebut. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengembangkan kebijakan dan program pengelolaan sampah sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Akan tetapi, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan yang sering ditemukan antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilah sampah, keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat pengolahan dan bank sampah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah (Subarsono, 2015).

Dalam perkembangannya, paradigma pengelolaan sampah mengalami perubahan dari pendekatan tradisional menuju pengelolaan modern yang lebih berkelanjutan. Pengelolaan sampah modern menekankan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang bertujuan mengurangi jumlah sampah

sejak dari sumbernya. Konsep *Reduce* mengajak masyarakat mengurangi penggunaan produk yang menghasilkan banyak sampah. *Reuse* mendorong penggunaan kembali barang yang masih layak pakai, sedangkan *Recycle* menekankan pengolahan kembali sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Prinsip tersebut dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan lama yang hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir sampah (Nugroho, 2014).

Penerapan prinsip 3R membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sampah. Hal ini karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia layanan pengangkutan sampah, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, regulator, dan pendorong partisipasi masyarakat. Bentuk keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui program bank sampah, kegiatan gotong royong lingkungan, edukasi pengelolaan sampah sejak usia dini, serta pembentukan kelompok peduli lingkungan di tingkat RT dan RW.

Pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Selain membantu mengurangi volume sampah, pendekatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sampah yang bernilai jual. Dengan demikian, melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat diharapkan tercipta sistem pengelolaan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

B Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan publik yang penting dan kompleks di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, perkembangan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan juga terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan tersebut tidak hanya meningkatkan jumlah sampah, tetapi juga memunculkan jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan terpadu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola

konsumsi masyarakat menyebabkan volume, jenis, serta karakteristik sampah menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Permasalahan sampah tidak lagi dipandang hanya sebagai isu kebersihan lingkungan semata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, bahkan pembangunan berkelanjutan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, menimbulkan banjir akibat tersumbatnya saluran air, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, penumpukan sampah dalam jangka panjang juga berpotensi menimbulkan bencana lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat. Peristiwa longsor sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah menjadi salah satu contoh nyata bagaimana buruknya pengelolaan sampah dapat menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan manusia.

Data pengelolaan sampah nasional menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional mencapai puluhan juta ton setiap tahunnya dan sebagian masih belum terkelola dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, hingga berbagai kebijakan teknis lainnya. Namun dalam implementasinya, pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan fasilitas pengolahan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyatakan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar yang dipengaruhi oleh faktor struktural, kelembagaan, dan perilaku masyarakat.

Selama ini, sistem pengelolaan sampah di banyak daerah masih cenderung berorientasi pada pola kumpul–angkut–buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pendekatan tersebut dinilai kurang efektif karena hanya memindahkan masalah tanpa mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.

Oleh sebab itu, diperlukan perubahan paradigma menuju pengelolaan sampah modern berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang menekankan pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Pemerintah juga terus mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan serta pengendalian perubahan iklim.

Dalam konteks tersebut, pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi salah satu solusi yang dinilai efektif. Masyarakat sebagai penghasil sampah terbesar memiliki peran penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat melalui kegiatan seperti bank sampah, pemilahan sampah rumah tangga, edukasi lingkungan, serta program pengurangan sampah di tingkat lokal dapat membantu mengurangi volume sampah secara signifikan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

C. Landasan Teori

1. Teori Partisipasi Masyarakat

Teori partisipasi masyarakat menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan atau kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat bukan hanya kehadiran secara fisik, tetapi juga keterlibatan aktif dalam memberikan ide, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program.

Dalam pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting karena masyarakat merupakan pihak yang menghasilkan sampah setiap hari. Keterlibatan masyarakat melalui kegiatan seperti pemilahan sampah rumah tangga, program bank sampah, kegiatan gotong royong, serta edukasi lingkungan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Menurut teori partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969), tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui delapan tingkatan yang dikenal dengan *Ladder of Citizen Participation* atau tangga partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar peluang keberhasilan suatu kebijakan.

Relevansi dengan penelitian:

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat memerlukan keterlibatan aktif warga sehingga teori partisipasi menjadi dasar utama dalam memahami perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Kebijakan yang baik belum tentu berhasil apabila implementasinya mengalami hambatan.

Menurut model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi atau sikap pelaksana
4. Struktur birokrasi

Dalam pengelolaan sampah, implementasi kebijakan sering menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas, minimnya sumber daya, rendahnya sosialisasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Relevansi dengan penelitian:

Teori ini digunakan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di masyarakat.

D. Analisis Kebijakan

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia merupakan persoalan publik yang membutuhkan perhatian serius karena berdampak pada aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan produksi

sampah tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah, salah satunya melalui **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah** yang menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu terdapat **Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012** mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kebijakan tersebut menekankan perubahan paradigma dari pola lama *kumpul–angkut–buang* menuju pengelolaan berbasis pengurangan melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, terdapat empat faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang baik memerlukan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat maupun pelaksana program. Dalam pengelolaan sampah, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R. Sosialisasi yang dilakukan sering kali belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Kurangnya penyampaian informasi menyebabkan masyarakat hanya memahami pengelolaan sampah sebatas membuang sampah pada tempatnya, tanpa memahami pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya.

2. Aspek Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Di banyak daerah masih ditemukan keterbatasan fasilitas seperti:

1. Tempat sampah terpilah
2. Bank sampah
3. Tempat pengolahan sampah terpadu
4. Armada pengangkut sampah
5. Tenaga pengelola lingkungan

Keterbatasan tersebut menyebabkan proses pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi berkaitan dengan komitmen dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program. Dalam praktiknya, keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat serta komitmen aparat pemerintah daerah.

Masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan belum terbiasa memilah sampah dari rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan. Pengelolaan sampah melibatkan banyak pihak, seperti dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sektor swasta, serta masyarakat umum.

Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi antar lembaga sering belum optimal sehingga program berjalan secara parsial. Akibatnya, tujuan kebijakan sulit tercapai secara maksimal.

Selain dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan, persoalan pengelolaan sampah juga dapat dilihat melalui pendekatan **Good Governance**. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah karena masyarakat merupakan produsen utama sampah.

Melalui pendekatan berbasis masyarakat, pemerintah dapat mendorong partisipasi publik melalui pembentukan bank sampah, kegiatan gotong royong lingkungan, edukasi pengelolaan sampah, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena masyarakat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan sampah tidak terletak pada kurangnya kebijakan, tetapi lebih pada aspek implementasi kebijakan dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan fasilitas pendukung, serta koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kebijakan mengenai Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat untuk Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sampah merupakan persoalan publik yang kompleks dan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, banjir, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta berbagai aturan pendukung lainnya. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan, hambatan utama tidak terletak pada substansi kebijakan yang telah dibuat, tetapi pada proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, pendekatan **Good Governance** dan teori partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang relevan dan berkelanjutan. Melalui program seperti bank sampah, edukasi lingkungan, pemilahan sampah rumah tangga, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis kebijakan ini yaitu:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. Pemerintah daerah perlu menambah fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah, bank sampah, serta sarana pengolahan sampah yang memadai.
3. Diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lingkungan dalam pengelolaan sampah.
4. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengurangan sampah sejak dari tingkat rumah tangga.
5. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah perlu dilakukan secara berkala agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya kerja sama seluruh pihak, pengelolaan sampah berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Jakarta: KLHK.

Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: KLHK.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.